

PUBLIKASI ILMIAH

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

**NAKSIR SEMBIRING, SH
A.212.12.021**

**Dr. Marcus Lukman, S.H., M.H.
Sampur Dongan Simamora, SH., MH**

Abstract

This thesis is studies of the issue of criminal sanctions imprisonment, criminal fines and criminal indemnity payments in the corruption case of social assistance funds based on the verdict of the District Court Judge Pontianak Number Decision Number: 11 / Pid Sus / TP Corruption / 2013 / PN PTK. By the legal research applies obtained conclusion, that : 1 Application sanctions imprisonment, criminal fines and criminal restitution payment of damages in the verdict of the District Court Judge Pontianak Number Decision Number: 11 / Pid Sus / TP Corruption / 2013 / PN PTK Date August 29, 2013 to the defendant, not to reflect the value of substantive legal justice. Therefore, viewed from the perspective of the purpose of punishment, criminal sanctions are not going to provide a deterrent effect to the perpetrators of corruption and does not provide a general prevention against corruption behavior in Indonesia in the future. 2 The cause of the disparity verdict in corruption social aid in the criminal justice system in Indonesia can be seen from 4 (four) asepek, namely: a. The use of criminal law as a premium remidium and minimum criminal sanctions (specifically minimum) and maximum (minimum highest) as formulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 31, 1999 on Eradication of Corruption Act as amended by Law Number 20, 2001, it turns out in practice still not efektif. b. Factors integrity, morality, capability, and professionalism of judges who carry out the mandate is still low in corruption eradication in Indonesia. c. Factors criminal and lawyer, who attempted in various ways (bribes) to influence the judge to give a lenient verdict to the defendant. d. Not padunya implementation of an integrated criminal justice system (Integrated Criminal Justice System) by Law Enforcement Institutions in Indonesia. Furthermore, it is recommended that the application of criminal sanctions in corruption cases in Indonesia can be implemented to meet the value of the substantive law of justice, it is necessary to clear sentencing guidelines based on criminal law. In addition, integrity, morality, capability, and professionalism of law enforcement officials in the criminal justice system in Indonesia needs to be continually improved over time.

Keywords: application, imprisonment, criminal fines, criminal Compensation loss, corruption, social aid, and court decisions.

Abstrak

Tesis ini membahas masalah penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti kerugian dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK Tanggal 29 Agustus 2013 kepada terdakwa, belum mencerminkan nilai keadilan hukum substantif. Sebab, dilihat dari persepektif tujuan pemidanaan, penerapan sanksi pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan tidak memberikan prevensi umum terhadap perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia ke masa depan. 2. Faktor penyebab terjadinya disparitas vonis hakim dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu: a. Penggunaan hukum pidana sebagai premium remedium dan penerapan sanksi pidana paling singkat (minimum khusus) dan paling lama (minimum tertinggi) sebagaimana diformulasikan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata dalam praktiknya masih belum efektif. b. Faktor integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas hakim yang masih rendah dalam mengemban amanah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. c. Faktor pelaku tindak pidana dan pengacaranya, yang berupaya dengan berbagai cara (suap) untuk mempengaruhi hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa. d. Belum padunya pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) oleh Institusi Penegak Hukum di Indonesia. Selanjutnya direkomendasikan agar penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilaksanakan memenuhi nilai keadilan hukum substantif, maka diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas berdasarkan undang-undang hukum pidana. Selain itu integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan sepanjang masa.

Kata Kunci: penerapan, pidana penjara, pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti kerugian, tindak pidana korupsi, dana bantuan sosial, dan putusan pengadilan.

Latar Belakang

Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (dana Hibah) ke KONI Provinsi Kalbar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat TA. 2007 s.d. 2009 yang terjadi pada Tahun 2007 sampai dengan bulan September Tahun 2009 telah diproses sampai ke putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Tindak pidana ini dilakukan oleh **Tersangka Drs. H. ISWANTO** pada saat menjabat Wakil Bendahara KONI Prov. Kalbar periode Tahun 2004 s.d. Tahun 2008 dan mantan Bendahara KONI Prov. Kalbar periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013. Tersangka telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya selaku Bendahara KONI Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 25 A Tahun 2009 tanggal 7 September 2009.

Dari hasil penyidikan Penyidik Polda Kalimantan Barat diperoleh bukti kuat bahwa Tersangka Drs. H. ISWANTO telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Perbuatan Tersangka Drs. H. ISWANTO dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp. 15.242.552.838,07** atau **31,59 %** dari total jumlah realisasi bansos yang diterima KONI Kalimantan Barat sebesar **Rp. 48.250.000.000,00**. Hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari BPK RI Perwakilan Prov. Kalbar Nomor: 01 / HP / XIX.PNK/ 03 / 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial KONI TA. 2007, 2008 dan 2009 pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun Anggaran 2007 kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.413.000.000,00 atau 18,21 % dari total jumlah realisasi bansos Prov. Kalbar kepada KONI Kalimantan Barat sebesar Rp. 13.250.000.000,00 yang disebabkan perbuatan melawan hukum melalui rekayasa bukti pertanggungjawaban fiktif dan pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti-bukti yang lengkap dan sah yang dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut;
- 2) Tahun Anggaran 2008 kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.715.000.000,00 atau 36,95 % dari total jumlah realisasi bansos Prov. Kalbar kepada KONI Kalimantan Barat sebesar Rp. 29.000.000.000,00 yang disebabkan perbuatan melawan hukum melalui rekayasa bukti pertanggungjawaban fiktif dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut;
- 3) Tahun Anggaran 2009 (sampai dengan bulan September) kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.114.552.838,07 atau 35,24 % dari total jumlah realisasi hibah Prov. Kalbar kepada KONI Kalimantan Barat sebesar Rp. 6.000.000.000,00 yang disebabkan perbuatan melawan hukum melalui penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pribadi dan penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.

Terhadap perbuatan tersangka tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan:

- a. Primer : perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Namun dakwaan ini ternyata Tidak Terbukti;
- b. Subsidiar : perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 a (1) ke KUHP jo pasal 64 A yat (1) KUHP. Dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

1) Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 15.242.552838.07 (lima belas milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh sen).

2). Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. membebaskan terdakwa DRS. H. ISWANTO dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa DRS. H. ISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DRS. H. ISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima

puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

4. Membebaskan kepada terdakwa Drs. H. ISWANTO untuk **membayar uang pengganti sebesar RP. 2.114.552.838,07** (Dua miliar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan agar barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pembuktian perkara terkait lainnya.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK Tanggal 29 Agustus 2013 antara lain menyatakan:

- a. Terdakwa Drs. H. Iswanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- b. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 Tahun Penjara dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50 juta subsidiair 2 bulan kurungan;
- c. Dikenakan sanksi membayar uang pengganti sebesar Rp. **2.114.552.838,07** yang apabila tidak terbayar akan dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa menyatakan menerima putusan hakim, tidak melakukan banding dan kasasi, sehingga dengan demikian putusan majelis hakim menjadi final.

Mencermati fakta-fakta hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak di atas, masih terdapat permasalahan hukum yang perlu dicermati, antara lain:

- 1) Adanya perbedaan antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak hanya 3 (tiga) tahun penjara;
- 2) Pembayaran uang pengganti hanya sebesar Rp. **2.114.552.838,0**, padahal berdasarkan Laporan Hasil Investigatif BPK RI Perwakilan Prov. Kalbar Nomor 20/S/VIII/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, ditemukan kerugian Negara atau keuangan daerah sebesar **Rp. 15.242.552.838,07**.

Jika vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibandingkan dengan vonis Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, maka vonis Pengadilan Negeri Pontianak tersebut jauh lebih rendah. Para terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung telah

divonis sebagai berikut:¹

- a. Mantan Walikota Bandung Dada Rosada divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin 28 April 2014;
- b. Sedangkan Edi Siswadi, mantan Sekretaris Kota Bandung yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos), divonis 8 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan;
- c. Setyabudi dengan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan tiga bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan 4 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman 16 tahun penjara; dan
- d. Toto Hutagalung divonis selama 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Vonis ini lebih ringan 3 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 10 Tahun Penjara dan denda Rp 500 juta.

Permasalahan

Mengapa terjadi disparitas vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Pembahasan

A. Faktor penyebab terjadinya disparitas vonis hakim dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

1. Maraknya Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial

Dalam konteks pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) telah terjadi tindak pidana korupsi hampir di seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dana bansos tersebut erat kaitannya dengan besarnya dana bansos yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2007 sampai tahun 2013.

Menurut Emerson Yuntho (Anggota Badan Pekerja ICW), Pemerintah setiap tahunnya telah mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Jumlahnya sungguh fantastis. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun.²

Namun sangat disesalkan, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dimaksud ternyata rawan diselewengkan dan melenceng dari tujuan awalnya, yaitu untuk **kesejahteraan rakyat**. Potensi terjadi penyimpangan atau korupsi sangat tinggi mengingat alokasi dana bansos yang sangat besar. Korupsi dana bansos sudah menjadi wabah seperti penyakit karena menyebar ke sejumlah daerah.

¹ TEMPO.COM, Jakarta 28 April 2014, Tribunnews.com. Bandung, 24 April 2014. Diakses Juli 2014.

² JDIH, KOMPAS.com, diakses Juli 2014.

Pada 2007, Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan adanya realisasi anggaran bansos sebesar **Rp 1,015 triliun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan**. Hasil pemeriksaan BPK semester I/2010 juga menemukan penyimpangan penggunaan dana **bansos di 19 provinsi yang nilainya mencapai Rp 765 miliar**. Potensi korupsi dana bansos di sejumlah pemerintah daerah juga sudah diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian yang dibuat pada 2011. KPK menemukan persoalan dana bansos dalam dua aspek utama, yaitu **regulasi dan tata laksana**.

Dari **aspek regulasi**, KPK menemukan adanya **ketidaksinkronan antara kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait bansos**. Juga tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang keadilan dalam pengelolaan dana bansos.

Dalam **aspek tata laksana** ditemukan **sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan**. Peruntukan dana bansos juga sangat bervariasi, mulai dari kepentingan pribadi dan atau keluarga, menyumbang tempat ibadah, membantu organisasi masyarakat atau keagamaan atau kepemudaan dan tokoh agama, hingga membiayai klub sepak bola di daerah. Modus korupsi dana bansos biasanya beragam. Modus yang sering terjadi adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif.

Potensi penyimpangan terjadi karena tidak ada pedoman umum yang rinci tentang penyaluran dana bansos. Selain itu, mekanisme penyaluran dana yang dibuat pemerintah daerah sering kali dipengaruhi kepentingan elite politik atau partai politik tertentu. Alokasi dana bansos biasanya mengalami peningkatan menjelang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Contoh terbaru terjadi di Jawa Barat (Jabar). Dana bansos menjelang Pilkada 2013 dilaporkan meningkat dari sebelumnya Rp 173,2 miliar menjadi Rp 4,8 triliun. Alokasi dana bansos di antaranya untuk bantuan 5.304 desa di Jabar, masing-masing desa menerima Rp 100 juta. Kenaikan jumlah dana bansos secara berlipat dari tahun sebelumnya juga terjadi di daerah lain yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2013 seperti Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tidak dapat dimungkiri, akibat penyimpangan yang terjadi, dana bansos menjelma menjadi dana bantuan koruptor. Korupsi dana bansos melahirkan sejumlah aktor atau pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Aktor lain yang juga terlibat adalah pengurus yayasan,

panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik, ataupun organisasi masyarakat. Dari sekian banyak aktor, kepala daerah yang mencalonkan kembali (petahana) paling sering memanfaatkan peluang ini karena memiliki berbagai kewenangan untuk menentukan anggaran. Aturan yang longgar dan tidak adanya transparansi menyebabkan dana bansos rawan disimpangkan dan hanya bisa diakses atau dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan elite penguasa.

Untuk menyelesaikan persoalan wabah korupsi dana bansos sesungguhnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan, kasus korupsi dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku yang mencoba merampok dana bansos.

Realitasnya, sudah banyak kasus dana bansos yang telah diproses penegak hukum. KPK melansir, **sampai 2012 sedikitnya 20 kasus korupsi dana bansos ditangani KPK di tingkat penyelidikan dan penindakan**. Baik Kejaksaan maupun Kepolisian—dalam catatan Indonesia Corruption Watch—sejak 2007-2012 telah menangani sedikitnya **120 kasus korupsi dana bansos di seluruh Indonesia**. Dana bansos yang dikorupsi mulai dari jutaan rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Sebagian pelaku bahkan telah dihukum bersalah dan dijebloskan ke penjara.

Sementara dari aspek pencegahan, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi dana bansos di masa mendatang. Pertama, penghapusan alokasi dana bansos dalam anggaran daerah dan nasional. Usulan ini pernah dilontarkan BPK pada 2011 karena seringnya lembaga ini menemukan penyaluran bantuan sosial di daerah yang sebagian besar tidak jelas pertanggungjawabannya. BPK merekomendasikan pos anggaran bantuan sosial dihapus dan diganti dengan metode lain.

Kedua, menghentikan sementara (moratorium) penyaluran dana bansos, terutama di daerah yang akan menggelar pilkada. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan dana bansos dan menjamin proses pilkada berjalan secara lebih fair.

Pada masa moratorium, pemerintah sebaiknya menindaklanjuti hasil kajian KPK tentang dana bansos, khususnya pada bidang regulasi dan tata laksana. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, termasuk perubahannya yang saat ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dana bansos. Regulasi tersebut masih dinilai lemah dari aspek transparansi dan akuntabilitas serta masih membuka peluang bagi legalisasi korupsi dana bansos.

Kementerian Dalam Negeri dapat melibatkan KPK dalam membuat aturan khusus yang rinci dan ketat terkait dengan pengelolaan dana bansos. Tindakan pencegahan ini penting dilakukan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan mencegah terulangnya praktik korupsi dana bansos. Pada akhirnya, dana yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat dan bukan untuk koruptor.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan

Menurut ICW, sejak tahun 2008 s/d 2012 penerapan sanksi pidana terhadap koruptor dinilai belum memcerminkan keadilan hukum substantif yang optimal. Hal ini terlihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa **dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa)**, dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara. Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan **pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa)**, dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun. **Jika dilihat secara umum, nilai rata-rata hukuman (average rate) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara.** Sedangkan nilai rata-rata tuntutan Penuntut Umum, yaitu 3 tahun 2 bulan. Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah **2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.**³

ICW juga berpendapat, penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan. Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimal nya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat dari pada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 UU Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kerap dijadikan

³ Indonesia Corruption Watch, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Op. Cit.*, Hlm. 22.

alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindari dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat. Selain pasal 2 dan pasal 3, pasal – pasal yang berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. Misalnya, pasal 5 dan pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan menganggap pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman yang lebih berat.⁴

Selain faktor undang-undang terjadinya disparitas pemidanaan juga bisa bersumber dari **Hakim itu sendiri**, yang terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.⁵

Kemudian tentu saja pelaku tindak pidana, yang berupaya dengan berbagai cara (suap) untuk mempengaruhi hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa. Faktor ini juga melibatkan pengacara yang secara formal berperan sebagai penegak hukum tetapi disisi lain juga berperan sebagai perantara kiennya untuk memberikan suap kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa dimaksud.

Dalam konteks yang lebih luas, terjadinya disparitas pemidanaan juga dapat disebabkan karena belum padunya pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (***Integrated Criminal Justice System***). Sebab hakikat Sistem Peradilan Pidana tiada lain merupakan proses dalam penegakan hukum pidana, yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dalam konteks ini, maka Sistem Peradilan Pidana juga merupakan langkah konkrit (*in concreto*) dari suatu proses penegakan hukum pidana (*in abstracto*), di mana seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana diperiksa, dituntut, diadili, dan dijatuhi hukuman, bilamana terdapat fakta-fakta hukum atau alat bukti yang kuat tentang kesalahan terdakwa.⁶

Dalam proses peradilan pidana terdapat dua aspek (instrumen yuridis) yang wajib dijadikan acuan oleh aparaturnya penegakan hukum, yaitu :

⁴ *Ibid*, Hlm.39-41.

⁵ *Ibid*.

⁶ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, Hlm.84.

- (a) **aspek normatif** ialah adanya peraturan hukum pidana materiel (KUHP atau Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP) yang mengatur delik kejahatan dan pelanggaran pidana berikut sanksinya;
- (b) **aspek administratif** ialah adanya hukum acara yang mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan peradilan pidana.⁷

Selain kedua aspek di atas, dalam proses penegakan hukum pidana umum maupun tindak pidana khusus (korupsi) terdapat sub sistem institusi/lembaga penegak hukum yang berfungsi melaksanakan bekerjanya sistem peradilan pidana, yaitu : (1) sub sistem kepolisian (*police*) yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan; (2) sub sistem kejaksaan (*prosecution*) dengan tugas di bidang penuntutan, (3) sub sistem pengadilan (*court*) yang bertugas memeriksa perkara pada persidangan dan menjatuhkan vonnis; dan (4) sub sistem lembaga pemasyarakatan (*correctional institution*) sebagai lembaga yang bertugas membina nara pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya (menjadi residivis) di masa mendatang.

Keempat sub sistem tersebut juga diharapkan mampu mewujudkan tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana, ialah untuk: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat dapat menilai bahwa keadilan telah ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku; dan (3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak mengulangi lagi kejahatannya di masa mendatang.

Dengan demikian, tujuan akhir dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar terintegrasi kembali ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi anggota masyarakat yang hidup normal dan taat hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara normatif telah mengatur prosedur atau tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di sidang peradilan pidana, yaitu melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Tahap "pra-ajudikasi" (Pasal 102-136 KUHP) yang menjadi kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan :
 - a. **Penyelidikan** : adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHP). Di sini Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan

⁷ Ibid.

tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum (Pasal 102 KUHAP).

b. Penyidikan : adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Di sini Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik Polri menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum [(Pasal 8 ayat (3) b KUHAP)]. Demikian pula dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri [(Pasal 107 ayat (3))].

(2) Tahap penuntutan (Pasal 137-144 KUHAP) yang menjadi wewenang dan tugas kejaksaan (penuntut umum) untuk melimpahkan perkara pidana disertai surat dakwaan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

(3) Tahap "ajudikasi" (Pasal 145-232 KUHAP) ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

(4) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270). Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278 KUHAP). Register pengawasan dan pengamatan tersebut wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun (Pasal 277-279 KUHAP).

Perlu ditegaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak hanya diatur berdasarkan KUHAP, melainkan diatur pula oleh peraturan perundang-undangan sektoral yang menjadi domain masing-masing institusi penegak hukum, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara; (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI; serta; (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Undang-Undang Institusi Penegak Hukum di atas, sama sekali tidak mengatur secara tegas tentang apa

yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu. Pemahaman mengenai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), justru dikembangkan melalui **doktrin hukum pidana** atau pendapat **para pakar hukum pidana**, antara lain sebagai berikut :

- a. Makna dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi atau keselarasan, yang dapat dibedakan dalam tiga hal : **Pertama**, sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum. **Kedua**, sinkronisasi substansial (*substansial sincronization*) yaitu keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. **Ketiga**, sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*) yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸
- b. Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.⁹ Konkretnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan manajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasanya : “Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen.¹⁰
- c. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini hanya difokuskan terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.¹¹
- d. Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat dan Advokat.¹²
- e. Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “vonnis” hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif. Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

⁸ Muladi dalam Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996, Hlm.17.

⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1982. Alumni, Bandung, .

¹¹ Satjipto Rahadjo, Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 97.

¹² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*

mengalokasikan dasarnya Sistem Peradilan Pidana dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice System Science*.¹³

- f. Menurut Mardjono Reksodiputro maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹⁴
- g. Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan membedakan antara *Criminal Justice System* dengan *Criminal Justice Process*.¹⁵ Pada dasarnya, *Criminal Justice System* adalah: “...is the system by which society, first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law. Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu *Criminal Justice System* merupakan substantive law sedangkan *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari *Substantive law*.
- h. Menurut Allan Coffey maka ada perbedaan antara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system”.¹⁶
- h. Menurut Neil C. Chamelin, bahwa di Amerika Serikat tempat lahirnya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal dimana ditentukan dengan redaksional: “Basically the American *Criminal Justice System* is composed of Police, Courts, and Corrections in local, state, and federal levels. These criminal justice components functions separately and together with majority of activities occurring at the local level of government (city and country).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Lilik Mulyadi,¹⁸ menunjukkan adanya kaitan yang erat antara konsep *Criminal Justice System* dengan tujuan umum hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara), yang menurut asasnya dapat dikatakan bahwa “kebijakan hukum pidana” adalah semakna dengan istilah “politik hukum pidana”. Sebab, lazimnya, istilah “politik hukum pidana”, juga disebut dengan istilah *penal policy*, *criminal law* atau *strafrechtpolitiek*. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, Hlm. 84-85.

¹⁵ Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1982, Hlm. 70.

¹⁶ Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, PT. Jambatan, Jakarta, 2004, Hlm. 1-2.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lilik Mulyadi, Pergeseran, ..Op. Cit.

reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum.¹⁹ Dikaji dari perspektif politik hukum maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut **Marc Ancel** maka penal policy merupakan “Ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik”. Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah penal policy menurut **Ancel**, sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. Konkretnya, menurut Jeremy Bentham, janganlah hukum pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula **Packer** pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*prime threatener*). Karena keterbatasan penal, maka dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (termasuk menggunakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya).²⁰

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya disparitas vonis hakim dalam tindak pidana korupsi dan bantuan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Penggunaan hukum pidana sebagai premium remedium dan penerapan sanksi pidana paling singkat (minimum khusus) dan paling lama (minimum tertinggi) sebagaimana diformulasikan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata dalam praktiknya masih belum efektif..
- b. Faktor integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas hakim yang masih rendah dalam mengemban amanah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- c. Faktor hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang muncul didalam proses persidangan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum serta keyakinan Hakim terhadap diri terdakwa yang dijadikan pembeda dalam berat ringannya saksi pidana yang dijatuhkan.
- d. Belum terpadunya pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal*

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, p. 2.

²⁰ Lilik Mulyadi, Pergeseran, *Op. Cit.*

Justice System) oleh Institusi Penegak Hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmad Djuaeni Kadmasasmita, 2008. Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi, Makalah, Jakarta : STIA LAN.
- Apeldoorn, L..J. Van, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2005. Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Konflik, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni.
- _____, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- _____, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Semarang : Pustaka Magister.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Kahar Masyhur, 1985. Membina Moral dan Akhlak, Jakarta : Kalam Mulia.
- Kelsen, Hans 2011. General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000. Otonomi Daerah, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta : PT. Jambatan.
- _____, Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.